



**PERUBAHAN RENCANA KERJA  
(PERUBAHAN RENJA)**

**DINAS PEKERJAAN UMUM  
PERUMAHAN DAN KAWASAN PERMUKIMAN**

**TAHUN 2018**

# **KATA PENGANTAR**



Berdasarkan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 54 Tahun 2010 tentang Pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan, Tatacara Penyusunan, Pengendalian, dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah dan Peraturan Daerah Kota Yogyakarta nomor 6 Tahun 2006 tentang Tata Cara Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah dan Pelaksanaan Musyawarah Perencanaan Pembangunan Daerah, sehubungan dengan itu maka Dinas Pekerjaan Umum Perumahan dan Kawasan Permukiman Kota Yogyakarta menyusun perubahan rencana kerja ( Perubahan RENJA ) tahun 2019 .

Perubahan RENJA Dinas Pekerjaan Umum Perumahan dan Kawasan Permukiman Kota Yogyakarta merupakan dokumen perencanaan pembangunan tahunan yang disusun untuk menjamin keterkaitan antara perencanaan, penganggaran, pelaksanaan dan pengawasan dan merupakan bagian dalam tahapan penyusunan Rancangan Pendapatan dan Belanja Daerah Perubahan (APBDP) yang penyusunannya dimulai dengan pendekatan perencanaan partisipatif melalui melalui proses musyawarah perencanaan pembangunan (musrenbang) mulai dari tingkat kelurahan, kecamatan sampai tingkat kota.

Demikian Semoga penyusunan dokumen renja ini bermanfaat bermanfaat sebagai acuan pelaksanaan kegiatan dan bagi pihak-pihak yang berkepentingan.

**Yogyakarta,**

**KEPALA**

**Agus Tri Haryono, ST.MT**  
**NIP. 19720306 1996031 004**

# DAFTAR ISI

<b>KATA PENGANTAR</b> .....	<b>i</b>
<b>DAFTAR ISI</b> .....	<b>ii</b>
<b>BAB I PENDAHULUAN</b> .....	<b>I.1</b>
1.1. Latar Belakang .....	I.1
1.2. Landasan Hukum.....	I.1 - I.3
1.3. Maksud dan Tujuan.....	I.3 - I.3
1.4. Sistematika Penulisan .....	I.3
<b>BAB II EVALUASI PELAKSANAAN RENJA SKPD SAMPAI DENGAN TRIWULAN II</b> .....	<b>II.1</b>
2.1. Evaluasi hasil Capaian Kinerja Pelayanan SKPD sampai dengan Triwulan II tahun .....	II.1
2.2. 2018 .....	
Analisis Kinerja Pelayanan Dinas Pekerjaan .....	II.1 – I.2
2.3. Umum Perumahan dan Kawasan Permukiman..... Analisis Hasil Pengendalian Pelaksanaan Renja Perangkat Daerah sampai dengan Triwulan II .....	II.2
2.4. Tahun .....	
2018.....	II.2 – II.4
Penentuan Isu Penyelenggaraan Tugas Pokok dan Fungsi Perangkat Daerah.....	
<b>BAB III RENCANA PROGRAM DAN KEGIATAN DALAM PERUBAHAN RENJA SKPD</b> .....	<b>III.1</b>
3.1. Perubahan Belanja SKPD Tahun 2018.....	III.1
3.2. Rencana Program dan Kegiatan SKPD.....	III.1
3.3. Program dan Kegiatan.....	III.2 – III.3
<b>BAB IV PENUTUP</b> .....	<b>IV.1</b>
<b>LAMPIRAN</b>	

# **BAB I**

## **PENDAHULUAN**

### **1.1 Latar Belakang**

Mendasarkan pada Peraturan Menteri Dalam Negeri (Permendagri) Nomor 23 Tahun 2013 tentang Pedoman Penyusunan, Pengendalian Dan Evaluasi Rencana Kerja Pembangunan Daerah Tahun 2014, maka Dinas Pekerjaan Umum Perumahan dan Kawasan Permukiman Kota Yogyakarta berkewajiban menyusun Perubahan Rencana Kerja (Perubahan Renja) Perangkat Daerah Tahun 2018. Perubahan ini dilakukan berdasarkan hasil evaluasi pelaksanaannya dalam tahun berjalan menunjukkan adanya ketidaksesuaian dengan perkembangan keadaan, meliputi :

1. Perkembangan kondisi di lapangan yang menyebabkan kebutuhan anggaran meningkat
2. Usulan pekerjaan akibat kerusakan ataupun yang menjadi program kota
3. Pergeseran pagu kegiatan antar rekening berdasarkan hasil evaluasi sampai dengan TW II

### **1.2 Landasan Hukum**

Dasar hukum penyusunan Perubahan Rencana Kerja (Perubahan RENJA) Perangkat Daerah Tahun 2018 Dinas Pekerjaan Umum Perumahan dan Kawasan Permukiman Kota Yogyakarta adalah sebagai berikut :

1. Undang-undang Nomor 18 Tahun 1999 tentang Jasa Konstruksi;
2. Undang-undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional;
3. Undang-undang Nomor 17 Tahun 2007 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional Tahun 2005-2025;
4. Undang-undang Nomor 12 Tahun 2008 tentang Perubahan Kedua atas Undang-undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah;
5. Peraturan Pemerintah Nomor 29 Tahun 2000 tentang Penyelenggaraan Jasa Konstruksi;
6. Peraturan Pemerintah Nomor 30 Tahun 2000 tentang Penyelenggaraan Pembinaan Jasa Konstruksi;
7. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah;
8. Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2006 tentang Pengelolaan Barang Milik Negara/Daerah;

9. Peraturan Pemerintah Nomor 39 Tahun 2006 tentang Tata Cara Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Perencanaan Pembangunan;
10. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan Antara Pemerintah, Pemerintahan Daerah Provinsi, dan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota;
11. Peraturan Pemerintah Nomor 41 Tahun 2007 tentang Organisasi Perangkat Daerah;
12. Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2008 tentang Pedoman Evaluasi Penyelenggaraan Pemerintah Daerah;
13. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan, Tata Cara Penyusunan Rancangan Awal, Pengendalian, dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah;
14. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 59 Tahun 2007 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah;
15. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 17 Tahun 2007 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Barang Milik Daerah;
16. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 54 Tahun 2010 tentang Pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan, Tata Cara Penyusunan Rancangan Awal, Pengendalian, dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah;
17. Peraturan Daerah Kota Yogyakarta Nomor 6 Tahun 2006 tentang Tata cara Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah dan Pelaksanaan Musyawarah Perencanaan Pembangunan Daerah;
18. Peraturan Daerah Kota Yogyakarta Nomor 1 Tahun 2007 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah (RPJPD) Kota Yogyakarta Tahun 2005-2025;
19. Peraturan Daerah Kota Yogyakarta Nomor 4 Tahun 2007 tentang Pokok-Pokok Pengelolaan Keuangan Daerah;
20. Peraturan Daerah Kota Yogyakarta Nomor 3 Tahun 2008 Urusan Pemerintahan Daerah;
21. Peraturan Walikota Yogyakarta Nomor 93 Tahun 2017 tentang Susunan Organisasi, Kedudukan, Tugas, Fungsi dan Tata Kerja Dinas Pekerjaan Umum, Perumahan dan Kawasan Permukiman Kota Yogyakarta ;
22. Peraturan Walikota Yogyakarta Nomor 137 Tahun 2017 tentang Pembentukan Susunan Organisasi, Kedudukan, Tugas, Fungsi dan Tata Kerja Unit Pelaksana Teknis pada Dinas Pekerjaan Umum, Perumahan dan Kawasan Permukiman Kota Yogyakarta ;

23. Keputusan Walikota Yogyakarta Nomor 105 Tahun 2017 tentang Rencana Strategis Satuan Kerja Perangkat Daerah di Lingkungan Pemerintah Kota Yogyakarta Tahun 2017-2022;

### **1.3 Maksud dan Tujuan**

#### **1. Maksud**

Maksud dari penyusunan Perubahan Rencana Kerja Satuan Kerja Perangkat Daerah Tahun 2018 Dinas Pekerjaan Umum Perumahan dan Kawasan Permukiman Kota Yogyakarta adalah mewujudkan sinergitas antara perencanaan, penganggaran, pelaksanaan dan pengawasan pembangunan serta mewujudkan efisiensi alokasi berbagai sumber daya dalam pembangunan.

#### **2. Tujuan**

Adapun tujuan disusunnya Perubahan Rencana Kerja Satuan Kerja Perangkat Daerah Tahun 2018 adalah untuk menjadi pedoman dalam penyusunan rancangan Kebijakan Umum Anggaran APBDP serta Prioritas dan Plafon Anggaran Sementara Perubahan Tahun 2018, agar sejalan dengan target-target pembangunan yang harus dijalankan / direalisasikan sesuai dengan tugas pokok dan fungsi Dinas Pekerjaan Umum Perumahan dan Kawasan Permukiman Kota Yogyakarta.

### **1.4 Sistematika**

Sistematika Perubahan Rencana Kerja Satuan Kerja Perangkat Daerah Tahun 2018 Dinas Pekerjaan Umum Perumahan dan Kawasan Permukiman Kota Yogyakarta, sebagaimana dimaksud terdiri dari :

BAB I	Pendahuluan
BAB II	Evaluasi Pelaksanaan Renja PD Sampai Dengan Triwulan II
BAB III	Rencana Program dan Kegiatan Dalam Perubahan Renja PD
BAB IV	Penutup
LAMPIRAN	

## **BAB II**

### **EVALUASI RENJA PERANGKAT DAERAH SAMPAI DENGAN TRIWULAN II**

#### **2.1 Evaluasi hasil Capaian Kinerja Pelayanan PD sampai dengan Triwulan II tahun 2018.**

Evaluasi pelaksanaan sampai dengan triwulan II Tahun 2018 menguraikan tentang tentang hasil evaluasi Renja tahun berjalan 2018, selain itu juga memperhatikan dokumen Resntra sebagai bahan acuan. Sedangkan capaian kinerja penyelenggaraan pemerintah menguraikan pencapaian kinerja.

Analisis Capaian Kinerja Pelayanan pada Dinas Pekerjaan Umum Perumahan dan Kawasan Permukiman Kota Yogyakarta mulai tahun 2017 didasarkan pada Renstra 2017-2022 dimana indikator program dan target renstra PD telah disesuaikan dengan tugas pokok dan fungsi Dinas Pekerjaan Umum Perumahan dan Kawasan Permukiman Kota Yogyakarta. Hasil pelaksanaan Rencana Kerja Satuan Kerja Perangkat Daerah tahun 2018 dan Pencapaian Perencanaan Strategis (Renstra) Satuan Kerja Perangkat Daerah Dinas Pekerjaan Umum Perumahan dan Kawasan Permukiman Kota Yogyakarta triwulan II Tahun 2018 adalah sebagaimana tersebut dalam tabel dibawah.

( Tabel pada Excel )

#### **2.2 Analisis Kinerja Pelayanan Dinas Pekerjaan Umum Perumahan dan Kawasan Permukiman.**

Analisis kinerja pelayanan Dinas Pekerjaan Umum, Perumahan dan Kawasan Permukiman berupa pengkajian terhadap capaian kinerja pelayanan Dinas Pekerjaan Umum, Perumahan dan Kawasan Permukiman dengan kinerja yang dibutuhkan sesuai dengan dampak yang ditimbulkan atas kinerja pelayanan tersebut, serta mengidentifikasi permasalahan yang dihadapi untuk penyusunan program dan kegiatan dalam rangka peningkatan pelayanan Dinas Perumahan, Perumahan dan Kawasan Permukiman sesuai dengan tugas pokok dan fungsi Dinas Pekerjaan Umum, Perumahan dan Kawasan Permukiman sampai dengan triwulan II tahun 2018 masih terdapat kekurangan sarana prasarana pendukung kerja dalam melaksanakan program dan kegiatan untuk itu perlu adanya tambahan ataupun perbaikan guna

mendukung dan menghasilkan kinerja yang baik sehingga terciptanya pelayanan yang baik kepada masyarakat .

### **2.3. Analisis Hasil Pengendalian Pelaksanaan Renja Perangkat Daerah sampai dengan Triwulan II Tahun 2018**

Berdasarkan hasil pengendalian pelaksanaan rencana kerja Dinas Pekerjaan Umum Perumahan dan Kawasan Permukiman sampai dengan triwulan II tahun 2018 sebagai berikut :

- Capaian kinerja Dinas Pekerjaan Umum Perumahan dan Kawasan Permukiman sd TW II , target fisik 75 % sedangkan keuangan 22, 61 % . Pekerjaan fisik yang ditargetkan pada triwulan II dapat terlaksana sesuai target , namun beberapa belum dapat dilaksanakan disebabkan adanya gagal lelang.
- Namun ada beberapa tambahan usulan dan pagu anggaran disebabkan dana yang tersedia kurang mencukupi dan beberapa anggaran pada satu rekening mengalami kelebihan atau sisa lelang , maka perlu dikurangi ataupun dialokasikan ke kebutuhan lainnya.
- Perubahan-perubahan tersebut berpengaruh pada pagu anggaran dan tolak ukur serta target kinerja , maka perlu disesuaikan dengan penyusunan rencana kerja perubahan ( Renja ) Perubahan TA 2018.

### **2.4 Penentuan Isu Penyelenggaraan Tugas Pokok dan Fungsi Perangkat Daerah**

Dari hasil analisis terhadap gambaran pelayanan Dinas Pekerjaan Umum, Perumahan dan Kawasan Permukiman, hasil evaluasi pelaksanaan Renja maupun hasil terhadap pencapaian kinerja Renstra , maka selanjutnya dapat dirumuskan isu-isu penting yang terkait dengan penyelenggaraan tugas pokok dan fungsi Dinas Pekerjaan Umum, Perumahan dan Kawasan Permukiman Kota Yogyakarta, untuk menentukan permasalahan, hambatan atas pelaksanaan program dan kegiatan penyelenggaraan tugas dan fungsi tugas pokok dan fungsi Dinas Pekerjaan Umum, Perumahan dan Kawasan Permukiman Kota Yogyakarta, dan untuk menentukan peluang dan tantangan dalam rangka meningkatkan kinerja penyelenggaraan tugas pokok dan fungsi.

#### **Tugas Pokok dan Fungsi**

1. Berdasarkan Peraturan Walikota Yogyakarta Nomor 93 Tahun 2017 tentang Susunan Organisasi, Kedudukan, Tugas, Fungsi dan Tata Kerja Dinas Pekerjaan Umum, Perumahan dan Kawasan Permukiman Kota Yogyakarta ;



Dinas Pekerjaan Umum, Perumahan dan Kawasan Permukiman Kota Yogyakarta memiliki fungsi sebagai :

- (1) Pelaksana urusan umum, kepegawaian, keuangan, administrasi, data dan Pelaporan.
- (2) Pengelolaan kebinamargaan .
- (3) Pengelolaan prasarana pengairan dan drainase.
- (4) Pengelolaan prasarana dasar permukiman, sanitasi permukiman, perumahan dan saluran air limbah .
- (5) Penerangan jalan umum .
- (6) Pengelolaan Bangunan Gedung Pemerintah.

Adapun ketugasan yang dimiliki oleh Dinas Pekerjaan Umum, Perumahan dan Kawasan Permukiman Kota Yogyakarta adalah :

- a. Perumusan kebijakan teknis di bidang pekerjaan umum, perumahan dan kawasan permukiman;
- b. Penyelenggaraan urusan pemerintahan dan pelayanan umum di bidang pekerjaan umum, perumahan dan kawasan permukiman;
- c. Pelaksanaan koordinasi penyelenggaraan urusan di bidang pekerjaan umum, perumahan dan kawasan permukiman;
- d. Pembinaan dan pelaksanaan tugas di bidang pekerjaan umum, perumahan dan kawasan permukiman;
- e. Pengelolaan kesekretariatan meliputi perencanaan umum, kepegawaian, keuangan, evaluasi dan pelaporan; dan
- f. Pelaksanaan pengawasan, pengendalian evaluasi, dan pelaporan di bidang pekerjaan umum, perumahan dan kawasan permukiman;

- **Permasalahan dan Hambatan yang Dihadapi**

Dalam penyelenggaraan tugas pokok dan fungsinya Dinas Pekerjaan Umum, Perumahan dan Kawasan Permukiman Kota Yogyakarta menghadapi beberapa permasalahan, kendala maupun hambatan yang menyebabkan kurang optimalnya penyelenggaraan ketugasan Dinas Pekerjaan Umum, Perumahan dan Kawasan Permukiman Kota Yogyakarta , diantaranya adalah :

- a. Pendanaan / anggaran yang tidak sebanding dengan permasalahan pekerjaan umum.
- b. Sarana dan prasarana kerja yang kondisinya tidak cukup layak untuk operasional penyelenggaraan tugas dan fungsi.
- c. Keterbatasan kualitas dan kuantitas sumber daya aparatur yang menangani ketugasan teknis. Berkaitan dengan ketugasan teknis

pada Dinas Pekerjaan Umum, Perumahan dan Kawasan Permukiman Kota Yogyakarta.

- d. Sebagian besar saluran drainase, baik saluran tertutup maupun terbuka, memiliki sedimentasi berupa sampah, kotoran dan tanah yang mengakibatkan terganggunya aliran sehingga tidak lancar dan menggenang.
- e. Pembangunan saluran drainase khususnya di lingkungan permukiman tidak diikuti dengan peningkatan kesadaran dalam menjaga kebersihan saluran, sehingga banyak saluran yang tidak/kurang terpelihara dengan baik.
- f. Adanya genangan air yang sering terjadi karena kurang selarasnya sistem jaringan drainase dengan laju perkembangan jumlah penduduk dan perkembangan kota.
- g. Masih adanya tumpang tindih pemanfaatan saluran. Terdapatnya saluran air hujan yang juga digunakan untuk pembuangan air limbah, dan pada saluran yang lain juga berfungsi sebagai saluran irigasi.
- h. Rata-rata dimensi saluran kurang mencukupi akan kebutuhan debit drainase yang diperlukan.
- i. Banyaknya bangunan baik permanen dan semi permanen di bantaran sungai yang mengganggu konstruksi talud pengaman sungai.
- j. Banyaknya karamba yang dipasang oleh masyarakat menyebabkan terganggunya aliran sungai bahkan bisa membelokkan arah aliran yang menyebabkan rusaknya tanggul sungai.
- k. Begitu cepatnya laju perubahan fungsi lahan dari lahan terbuka menjadi lahan terbangun yang mengakibatkan diperlukannya infrastruktur permukiman.
- l. Usia talud yang rata-rata sudah berumur diatas 20 tahun sehingga perlu direhabilitasi.
- m. Konstruksi talud yang rata-rata terlalu curam kemiringannya dan kurang ketebalannya.
- n. Penanganan permukiman kumuh di kota Yogyakarta yang baru tertangani 60 ha dari luasan 264,89 ha , sehingga masih ada 204 ha yang akan diselesaikan sampai dengan tahun 2019.



# **BAB III**

## **TUJUAN, SASARAN PROGRAM DAN KEGIATAN**

### **TAHUN 2018**

#### **3.1 TELAAHAN TERHADAP KEBIJAKAN NASIONAL**

Telaah terhadap kebijakan nasional dilakukan dengan menguraikan kebijakan nasional berupa arah kebijakan pembangunan nasional yang tertuang dalam RPJMN maupun yang dirumuskan dalam RKP (rancangan awal), dan juga mengenai pengaruhnya terhadap penyusunan RKPD yang direncanakan. Perlu juga dilakukan telaahan atas kebijakan dari provinsi yang tertuang dalam RPJMD Provinsi maupun yang dirumuskan dalam RKPD Provinsi.

Sesuai dengan arah kebijakan, sasaran prioritas dan strategi nasional, maka program dan kegiatan di Kementerian pekerjaan umum mengarah kepada program prioritas yaitu Kebijakan pembangunan sarana dan prasarana perkotaan yang memadai sesuai dengan standar pelayanan minimal yang telah ditetapkan.

#### **3.2 TUJUAN DAN SASARAN RENJA DINAS PEKERJAAN UMUM PERUMAHAN DAN KAWASAN PERMUKIMAN**

Perumusan tujuan dan sasaran didasarkan atas rumusan isu-isu penting penyelenggaraan tugas dan fungsi Dinas Pekerjaan Umum Perumahan dan Kawasan Permukiman yang dikaitkan dengan sasaran target kinerja Renstra Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman, arah kebijakan dan prioritas pembangunan nasional maupun kota.

##### **3.2.1 Tujuan**

Tujuan dari rencana kerja Dinas Pekerjaan Umum Perumahan dan Kawasan Permukiman Kota Yogyakarta adalah :

- Mewujudkan Infrastruktur Pekerjaan Umum Yang Berkualitas Serta Perumahan Permukiman Yang Layak Huni dan Sehat

##### **3.2.2 Sasaran**

Sasaran dari rencana kerja Dinas Pekerjaan Umum Perumahan dan Kawasan Permukiman Kota Yogyakarta adalah :

- Kualitas Infrastruktur Pekerjaan Umum Meningkat

- Kualitas Infrastruktur Perumahan dan Permukiman Meningkat

### 3.3 PROGRAM DAN KEGIATAN

Berdasarkan perumusan antara hasil evaluasi terhadap capaian kinerja Renstra 2017-2022 , tugas pokok dan fungsi Dinas Pekerjaan Umum Perumahan dan Kawasan Permukiman, isu-isu penting yang berkaitan dengan bidang lingkungan, usulan masyarakat, analisa kebutuhan serta kajian program dan kebijakan nasional, maka program dan kegiatan yang akan dilaksanakan oleh Dinas Permukiman dan Wilayah Kota Yogyakarta di tahun 2018 adalah sebanyak 7 (tujuh) program dengan 13 (tiga belas ) kegiatan, dengan perincian sebagai berikut :

Program Pelayanan Administrasi Perkantoran, dengan kegiatan :

- a. Penyediaan Rapat-rapat Koordinasi dan Konsultasi .
  1. Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor.
  2. Penyediaan jasa Pengelola Pelayanan Perkantoran.

Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur, dengan kegiatan :

- a. Pemeliharaan rutin/berkala gedung / Bangunan kantor
- b. Pemeliharaan rutin/berkala kendaraan dinas/operasional

Program Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan, dengan kegiatan :

- a. Penyusunan laporan capaian kinerja dan ikhtisar realisasi kinerja SKPD

Program Pembangunan Gedung Pemerintah, dengan kegiatan :

- a. Perencanaan Teknis Gedung Pemerintah
- b. Pembangunan Gedung Pemerintah

Program Peningkatan dan Pemeliharaan Jalan dan Jembatan

- a. Peningkatan Jalan dan Jembatan
- b. Pemeliharaan Jalan dan Jembatan
- c. Pengelolaan Penerangan Jalan Umum

Program Peningkatan dan Pemeliharaan Saluran Pengairan dan Drainase

- 1) Peningkatan dan Pembangunan Saluran Pengairan dan Drainase

2) Pemeliharaan Saluran Pengairan dan Drainase

Program Penataan Perumahan, Permukiman dan Tata Bangunan

- a. Penataan Perumahan dan Permukiman
- b. Penataan Bangunan dan Permukiman
- c. Penataan Bangunan dan Lingkungan
- d. Pengelolaan Rusunawa
- e. Pengelolaan Saluran Air Limbah

( tabel 3.1 ) Tabel rumusan program dan Kegiatan , terlampir.

## **BAB IV**

### **PENUTUP**

Evaluasi Rencana Kerja (Renja) Dinas Pekerjaan Umum Perumahan dan Kawasan Permukiman Kota Yogyakarta sampai dengan triwulan II tahun 2018 dilaksanakan sebagai amanat Undang-undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional, Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan, Tata Cara Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Perencanaan Pembangunan Daerah dan mulai mengacu pada Permendagri Nomor 54 Tahun 2010.

Evaluasi yang dilaksanakan adalah terhadap pelaksanaan Rencana Kerja sampai dengan triwulan II tahun 2018 berdasarkan rencana target yang terdapat dalam Rencana Kerja Tahun 2018 secara berkesinambungan maka format penyusunan Perubahan Rencana Kerja disusun sesuai dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 54 tahun 2010.

Dari hasil evaluasi pencapaian kinerja program dan kegiatan telah dicapai sampai dengan triwulan II tahun 2018. Untuk itu perlu kerja keras kembali untuk pencapaian target pada tahun 2018 ini sebagai mana telah ditargetkan pada Renstra Dinas Pekerjaan Umum Perumahan dan Kawasan Permukiman Kota Yogyakarta Tahun 2017-2022 dalam rangka menunjang tercapainya Visi dan Misi Walikota Yogyakarta serta target dan sasaran pembangunan yang terdapat dalam Rencana Kerja Pembangunan Daerah (RKPD) Pemerintah Kota Yogyakarta tahun 2018.

Dengan adanya Perubahan Rencana Kerja Dinas Pekerjaan Umum Perumahan dan Kawasan Permukiman Kota Yogyakarta Tahun 2018, maka penetapan prioritas pembangunan yang merupakan upaya penjabaran dari visi dan misi Perangkat Daerah diharapkan akan lebih terakomodasi, terintegrasi dan sinergi serta berkelanjutan dengan sesama Perangkat Daerah lingkup Pemerintah Kota Yogyakarta maupun dengan Perangkat Daerah yang membidangi fungsi lain.

Yogyakarta, Juli 2018

Kepala Dinas

Agus Tri Haryono, ST.MT  
NIP. 19720306 199603 1 004





# LAMPIRAN

EVALUASI TERHADAP HASIL RENJA SKPD  
KOTA YOGYAKARTA TAHUN 2018

NAMA SKPD : DINAS PEKERJAAN UMUM, PERUMAHAN DAN KAWASAN PERMUKIMAN

No	Sasaran	Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcome) Kegiatan (output)	Formula Indikator Program	Target Capaian Kinerja Renstra SKPD pada Akhir Renstra		Realisasi Capaian Kinerja Renstra SKPD s/d RPKD Tahun Lalu (n-1) 2017		Target dan Realisasi Kinerja Program dan Kegiatan Tahun 2018								Realisasi Kinerja dan Anggaran Renstra SKPD s/d tahun 2017		Tingkat Ca dan Reals Renst s/d Tahu		
					Fisik	Keuangan	Fisik	Keuangan	Target Kinerja dan Anggaran Renja SKPD Tahun 2018		Target Renja SKPD TW II Tahun 2018		Realisasi Renja SKPD TW II Tahun 2018		Tingkat Realisasi TW II Tahun 2018		Fisik	Keuangan		Fisik	Keuangan
									Fisik	Keuangan	Fisik	Keuangan	Fisik	Keuangan	Fisik	Keuangan					
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16=14/10	17=15/11	18=8+14	19=9+15	20=18/6		
	Kualitas Infrastruktur Pekerjaan Umum Meningkat	Program Pelayanan Administrasi Perkantoran	Persentase kelancaran administrasi, keuangan dan operasional perkantoran	Jumlah output kegiatan yang tersusun lancar sesuai kebutuhan/jumlah output kegiatan yang direncanakan x 100%	100	-	100	1,602,757,797	100	2,191,419,252		1,333,015,016		904,266,920	-	68					
		1 Penyediaan Rapat-rapat Koordinasi dan Konsultasi	Makan dan minum yang tersedia untuk koordinasi, Makan dan minum yang tersedia untuk pegawai, Laporan hasil koordinasi dan konsultasi ke luar daerah		-	-	60,215,250		145		38	163,428,000	47	141,508,487	123	87			-		
		2 Penyediaan Jasa, Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Materai 6000 yang tersedia Materai 3000 yang tersedia Jasa Pengiriman/paket STNK roda 4 yang terbayar STNK roda 2 yang terbayar STNK roda 3 yang terbayar STNK roda 6 yang terbayar KIR roda 6 KIR roda 4 Pengadaan bibit Tanaman Alat tulis kantor yang tersedia Jasa percetakan Jasa Penggandaan Komponen instalasi listrik / penerangan bangunan kantor yang tersedia Rekening listrik Bahan bacaan/surat kabar yang tersedia Komponen peralatan dan perlengkapan kantor yang tersedia Jasa pemeliharaan peralatan dan perlengkapan kantor Pengadaan Perlengkapan Kantor Pengadaan mebelair Pengadaan alat studio Rekening telepon		-	-	3,396.000 1,404.000 - 18,545.500 - - - 1,625.200 - - 83,826.200 36,556.000 64,744.810 4,288.500 - 36,269.061 3,900.000 76,050.150 129,960.000 308,251.430 85,450.000 48,920.000 -		2,490 700 6 24 16 15 14 11 18 5 20 16 406,500 6 12 1 4 5 6 4 2 12	1,411,816,534	64	960,415,505	44	611,467,979	70	64			-		
		3 Penyediaan Jasa Pengelola Pelayanan Perkantoran	Jasa Tenaga Bantuan		-	-	399,028.694		13	406,524,718	50	209,171,511	50	151,290,454	100	72			-		
<b>Rata-rata capaian kinerja</b>															98	74					
<b>Predikat kinerja</b>															Sangat Tinggi	Sedang			Sangat Rendah		
	Kualitas Infrastruktur Pekerjaan Umum Meningkat	Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur	Persentase Sarana dan Prasarana Aparatur yang memadai	Jumlah output kegiatan yang tersusun lancar sesuai kebutuhan/jumlah output kegiatan yang direncanakan x 100%	100	-	100	799,964,975	100	674,081,000		288,860,000		217,333,149	-	75					
		1 Pemeliharaan Rutin/Berkala Gedung/Bangunan Kantor	Jasa pemeliharaan gedung / bangunan kantor/tempat		-	-	200,617.000		1	195,900,000	8	15,000,000	18	-	235	-			-		
		2 Pemeliharaan Rutin/Berkala Kendaraan Dinas/Operasional	Jasa pemeliharaan rutin/berkala kendaraan dinas/operasional roda 2 ( dua ) Jasa pemeliharaan rutin/berkala kendaraan dinas/operasional roda 3 ( tiga ) Jasa pemeliharaan rutin/berkala kendaraan dinas/operasional roda 4 (empat),		-	-	599,347,975		16	478,181,000	50	273,860,000	46	217,333,149	91	79			-		



		Pendataan dan Pemetaan Genangan	-	-	1	34	-	-									
	<b>2</b>	<b>Pemeliharaan Saluran Pengairan dan Drainase</b>	-	-		<b>7,316,702,221</b>	<b>29,566,614,370</b>	<b>36</b>	<b>10,640,833,075</b>	<b>35</b>	<b>7,890,686,875</b>	<b>97</b>	<b>74</b>				
		Pemeliharaan Saluran Pengairan dan Drainase	-	7,316.702.221	9,000			36		35		97					-
		Dokumen Perencanaan	-	-	3			-		-		-					
<b>Rata-rata capaian kinerja</b>												<b>94</b>	<b>84</b>				
<b>Predikat kinerja</b>												<b>Sangat Tinggi</b>	<b>Tinggi</b>				<b>Sangat Rendah</b>





	-	
<b>Sangat Rendah</b>		

	<b>Sekretariat</b>	
	-	-
	-	
	-	
<b>Sangat Rendah</b>		

	<b>Bidang Bangunan Gedung Pemerintah</b>	
	-	-
	-	
	-	-
	-	
	-	
<b>Sangat Rendah</b>		

	<b>Bidang Bina Marga</b>	
	-	-
	-	
	-	-
	-	
	-	-
	-	
	-	
<b>Sangat Rendah</b>		

	<b>Bidang Sumber Daya Air</b>	
	-	-
	-	

-		-
-		
-		
<b>Sangat Rendah</b>		



	Bidang Perumahan, Perkumhiman dan Tata Bangunan	
-		-
-		
-		-
-		
-		-
-		
-		-
-		
-		
Sangat Rendah		
Sangat Rendah		

Jakarta, 2018  
 Dievaluasi oleh  
 Kepala BAPPEDA

Ir. Edy Muhammad  
 NIP. 196309161992031006